

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infastruktur di Indonesia sedang gencar dilakukan begitupun di Jawa Barat yang akan memacu pertumbuhan perekonomian jawa barat, tidak hanya pembangunan infastruktur saja melainkan pembenahan infrastuktur yang merata dikota serta desa-desa akan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dinas daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam perencanaan dan penyusunan program, teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam serta pengawasan dan pemanfaatan.

Dengan tugas yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diharapkan adanya peningkatan produktifitas dan kerja sama yang baik dalam setiap bidang pekerjaan pegawai, sehingga semua permasalahan yang ada dapat ditangani dengan baik. Dengan melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan yang semakin berkembang, sarana dan prasarana dalam kantor semakin lama semakin menyesuaikan zaman. Dilansir dari berita halaman *Merdeka* pada tahun 2016 Ridwan Kamil yang pada masa itu menjabat sebagai Walikota Bandung memiliki program untuk memindahkan Pemerintahan Kota Bandung ke Gedebage Bandung Timur menjadi kawasan komplek pemerintahan dengan mengusung konsep Sunda Futuristik. Dimana kondisi kantor pemerintahan ini dihadirkan sebagai *image* dari pemerintahan baik yang menciptakan sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien, efektif, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 dalam Bab 1 pasal 1 ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui kantor pemerintahan tidak hanya memerlukan fungsional melainkan membutuhkan perhatian dalam keindahan kantor

pemerintahan. Melihat pada bangunan eksisting kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ruang kantor lebih menyesuaikan ruangan yang tersedia pada eksisting bangunan yang ada tanpa memerhatikan penyesuaian kebutuhan ruang bagi pegawainya. Terdapat pula permasalahan pengorganisasian ruang kerja yang belum tertata dengan baik. Selain itu terdapat pula penggunaan furnitur kerja yang kurang baik bagi pegawai kantor yang memiliki aktifitas berada didepan komputer sepanjang hari, sedangkan pada peraturan pemerintahan telah ditetapkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pada kantor pemerintahan. Dengan sarana dan prasarana yang sesuai bagi suatu instansi pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan permasalahan yang ada maka Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat membutuhkan perancangan ulang interior kantor dan perbaikan fasilitas tambahan yang di desain pada interior ruangan dan penggunaan treatment pada elemen-elemen interior kantor. Interior kantor dan penataan ruang yang baik bagi kantor pemerintahan dapat menjadi potensi aset pemerintah dengan menjadi standar atau contoh kantor pemerintahan dengan penambahan standar ketentuan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah untuk lebih baik bagi pegawai pemerintahan.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam perancangan interior kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan sarana dan prasarana ruang kantor yang belum memenuhi ketentuan dari pemerintah.
2. Desain furnitur yang kurang baik bagi pegawai sehingga mengganggu produktivitas kerja
3. Organisasi ruang dan layouting ruang yang tidak tertata baik sesuai dengan aktivitas pegawai dan mengganggu alur aktivitas kerja

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam perancangan ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penataan layout kerja yang baik bagi aktivitas kerja pegawai tidak terganggu?
- b. Bagaimana penerapan organisasi ruang kerja yang baik bagi kebutuhan dan aktivitas kerja pegawai?
- c. Bagaimana penerapan furnitur yang baik yang sesuai ketentuan dari pemerintah?

1.4 Batasan Perancangan

Terdapat beberapa batasan perancangan ruang dan batasan redesain interior kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang akan di desain, meliputi :

- a. Lokasi perancangan berada di Jl. Asia Afrika No.79, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat gedung area kantor 4 lantai dan luasan bangunan 4.306 m² dengan luas perancangan 3133.7 m²
- b. Fungsi utama kantor adalah sebagai kantor pemerintahan yang melakukan penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknik kebinamargaan dan penataan ruang.
- c. Pengguna dari kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah pegawai pemerintahan Dinas.
- d. Lingkup elemen-elemen interior seperti lantai, dinding, ceiling dan furnitur.

1.5 Tujuan dan Sasaran Perancangan

Tujuan dan sasaran perancangan dari redesain kantor Dinas Bina Marga dan Penataan ruang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- a. Terciptanya penataan layouting ruang kerja yang baik sehingga tidak mengganggu aktifitas dalam bekerja

- b. Terciptanya penataan organisasi ruang kerja yang baik bagi efektifitas pekerjaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dan aktifitas kerja dari pegawai
- c. Terciptanya penerapan furnitur yang ideal bagi pegawai dengan ketentuan ergonomic furniture kerja dan disesuaikan dengan standar ketentuan dari pemerintah.

1.6 Metode Perancangan

Metode perancangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan sebagai berikut :

- a) Menentukan objek perancangan

Menentukan objek perancangan apa yang akan dibuat merupakan hal pertama kali yang dilakukan sebelum melakukan proses desain. Pemilihan atau penetapan objek perancangan harus ditentukan dengan hati-hati agar berjalan sesuai dengan rencana.

- b) Melakukan pengumpulan data

Mengumpulkan data yang telah direncanakan, dengan pengumpulan data sebagai berikut :

- Data primer

Mencari segala informasi yang berkaitan dengan objek yang akan dirancang untuk mendukung proses perancangan berupa survey lapangan, observasi, wawancara atau interview serta dokumentasi

- Data Sekunder

Mencari kajian literatur yang berkaitan dengan perancangan dan data informasi yang dibutuhkan dapat berupa referensi dari buku, internet, jurnal maupun media cetak yang terpercaya keaslian sumbernya. Serta mencari perbandingan atau pebanding sebagai bahan rujukan.

- c) Melakukan analisa data

Setelah melalui beberapa tahap pengumpulan data mengenai objek perancangan dan fenomena dilapangan. Analisa dilakukan untuk mencari permasalahan yang timbul pada objek perancangan tersebut.

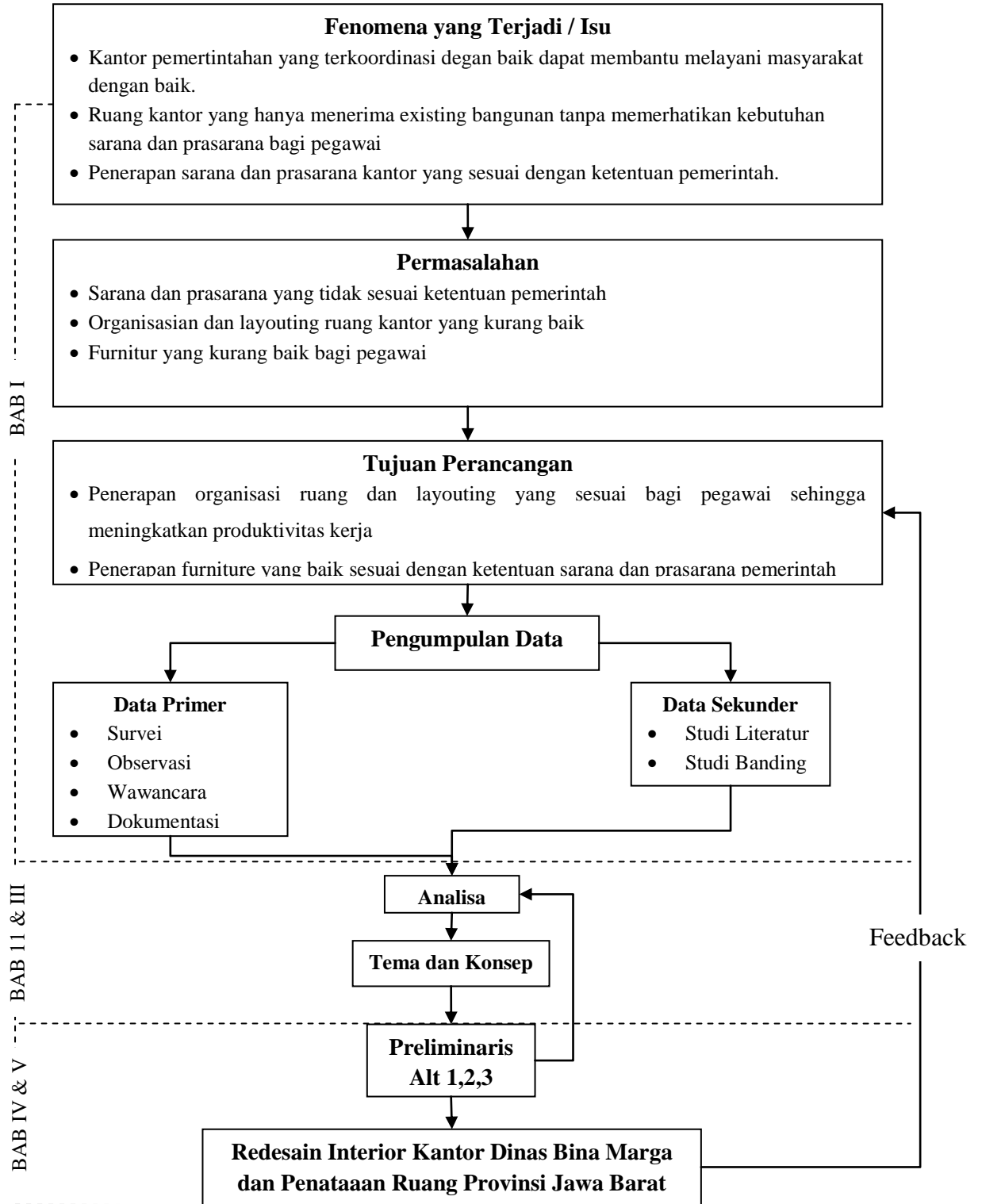
d) Tema dan konsep

Hasil dari analisa yang dilakukan, muncul beberapa ide sebagai pemecahan masalah yang digunakan sebagai tema dan konsep perancangan

e) Output pencangan

Berupa hasil akhir dari perancangan yang diharapkan dapat melakukan tahapan desain yang telah dianalisa menjadi konsep pada layouting, hasil 3D dan lain sebagainya.

1.7 Kerangka Berpikir



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir
(Sumber : Analisa Penulis, 2018)

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran beberapa pembahasan penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan objek perancangan, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi, tujuan perancangan, batasan perancangan, metode perancangan, kerangka perancangan sebagai pemetaan langkah-langkah perancangan dan sistematika penulisan sebagai gambaran penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas beberapa tinjauan umum mengenai kantor pemerintah, literatur tentang sarana dan prasarana kantor pemerintah, organisasi ruang kantor, bagaimana layouting dan furnitur kantor serta tinjauan image branding yang dapat dihasilkan terhadap interior atau elemen interior.

BAB III TEMA & KONSEP

Bab ini membahas konsep dari perancangan dengan penguraian pemilihan konsep, garis besar konsep dan fokus desain, aplikasi konsep secara langsung dalam perancangan serta kriteria desain yang akan digunakan dalam perancangan, programming perancangan, konsep bentuk, material, warna, penghawaan, dan keamanan

BAB IV KONSEP PERANCANGAN DAN DENAH KHUSUS

Bab ini membahas mengenai denah khusus redesain interior kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang, penyelesaian elemen interior.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya dan merupakan bab terakhir yang terdapat saran bagi berbagai pihak yang terkait dalam perancangan ini.

DAFTAR PUSTAKA